

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kearifan lokal

a. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur (Yuliati, 2013: 4).

Naritoom (Wagiran, 2012: 330) mendefinisikan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dalam uji coba dan terintegrasi dengan pemahaman tentang alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dinamis dengan fungsi kearifan lokal yang dibuat dan terhubung dengan situasi global.

Definisi kearifan lokal tersebut mengandung beberapa konsep antara lain:

- 1) Kearifan lokal merupakan sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang.
- 2) Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya.
- 3) Kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zaman.

Konsep tersebut juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Affandy (2012: 46) menyatakan bahwa kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman komunitas dan akumulasi pengetahuan lokal. Kearifan lokal ditemukan dalam masyarakat, komunitas, dan individu.

Berdasarkan beberapa definisi menggambarkan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik maupun budaya. Pengetahuan lokal merupakan hasil dari proses dialektika antara individu dan lingkungan serta respon individu dengan kondisi lingkungan. Pada tingkat individu, kearifan lokal muncul sebagai akibat dari proses kerja kognitif individu dalam upaya untuk mengatur nilai-nilai yang dianggap sebagai pilihan paling tepat bagi mereka. Pada tingkat kelompok, pengetahuan lokal adalah upaya untuk menemukan nilai-nilai bersama sebagai hasil dari hubungan pola atau pengaturan yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan tertentu. Pengetahuan lokal secara eksplisit berasal dari

periode masa lalu dan tumbuh bersama dengan masyarakat dan lingkungan.

Secara umum, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, nilai bagus, tertanam, dan diikuti oleh masyarakat (Sartini, 2004: 111). Dalam disiplin ilmu antropologi, istilah kearifan lokal telah dikenal sebagai lokal genius. Moendardjito (1986: 40) mengemukakan bahwa unsur budaya sebagai daerah potensial bagi kejeniusan lokal telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan hidup hingga saat ini.

Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek antara lain.

- 1) Gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak, yakni mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontakannya dengan masyarakat atau budaya lain.
- 2) Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dan dapat dilihat, biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik (Wagiran, 2012: 87).

Di Indonesia, kearifan lokal jelas mempunyai makna positif karena selalu dimaknai secara baik atau positif. Pemilihan kata kearifan lokal

disadari atau tidak merupakan sebuah strategi untuk membangun, menciptakan citra yang lebih baik mengenai pengetahuan lokal. Dengan menggunakan istilah kearifan lokal, sadar atau tidak orang menghargai pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal warisan nenek moyang dan kemudian bersedia bersusah payah memahaminya, sehingga dapat memperoleh berbagai kearifan dalam suatu komunitas, yang relevan untuk kehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang.

Dilihat dari jenisnya, *local wisdom* dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan pakaian (Istiawati, 2016: 5). Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat sebab masih banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak dapat dibatasi atau dikotak-kotak. Kategorisasi lebih kompleks dikemukakan Saini (2004: 111) yang meliputi pertanian, kerajinan tangan, pengobatan herbal, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, seni budaya, bahasa daerah, filosofi, agama dan budaya serta makanan tradisional.

Wagiran (2010: 332) mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan:

- 1) Tuhan
- 2) Tanda-tanda alam
- 3) Lingkungan hidup/pertanian
- 4) Membangun rumah
- 5) Pendidikan

- 6) Upacara perkawinan dan kelahiran
- 7) Makanan
- 8) Siklus kehidupan manusia dan watak
- 9) Kesehatan
- 10) Bencana alam

Ruang lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu:

- 1) Norma-norma lokal yang dikembangkan, pantangan dan kewajiban
- 2) Ritual dan tradisi masyarakat serta makna sebaliknya
- 3) Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat dan biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal
- 4) Informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, ketua adat, pemimpin spiritual
- 5) Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
- 6) Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari
- 7) Alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu
- 8) Kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari

b. Pendidikan Kearifan Lokal

Pendidikan kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka

hadapi. Paulo Freire (2007: 38) mengemukakan secara detil bahwa dengan dihadapkan pada problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapi secara kritis. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito (Wagiran, 2012: 47) yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal meliputi.

- 1) Membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan.
- 2) Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar.
- 3) Pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik.
- 4) Sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter.

Wagiran (2012: 333) memberikan gambaran bahwa kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur bangsa yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran diri, dan pengendalian diri. Upaya pengembangan pendidikan kearifan lokal tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran serta masyarakat secara optimal. Keikutsertaan berbagai unsur masyarakat dalam mengambil prakarsa dan menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berharga, dan perlu mendapat perhatian dan apresiasi.

Berbagai bentuk kearifan lokal merupakan daya dukung bagi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut.

- 1) Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar
- 2) Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia
- 3) Kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Keseniaan tertentu memiliki nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan
- 4) Kearifan lokal dalam sistem anjuran (tidak tertulis) Supriatna (2012: 25).

2. Konsep *Kalosara*

Suku Tolaki adalah sekelompok orang yang sejak lama mendiami Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yang terdiri dari beberapa wilayah antara lain: Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kolaka. Keberadaan masyarakat Tolaki ini masih memegang apa yang menjadi warisan dari para leluhurnya secara turun temurun dan masih menunjukkan eksistensinya hingga saat ini.

Hafid (2013:2) mengemukakan bahwa persebaran etnik Tolaki ini membawa sejumlah pranata-pranata sosial, ekonomi, politik, dan tata nilai. Sumber nilai dalam etnik *Tolaki* disebut *kalosara* yang selanjutnya disebut *kalo*. *Kalosara* hadir dalam kehidupan orang Tolaki bertujuan untuk

menciptakan masyarakat yang berbudi luhur serta untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan bersama dalam sektor kehidupan. Masyarakat Tolaki baik yang bermukim di pedesaan sebagai petani tradisional maupun yang bermukim di perkotaan sebagai pegawai negeri atau pengusaha sampai saat ini masih menempatkan *kalo* sebagai suatu yang sakral (Tarimana, 1993: 283).

Budaya *kalo* adalah pusat kultural suku bangsa Tolaki Sulawesi Tenggara. *Kalo* sebagai pusat kultural ethnic group Tolaki berarti sebagaimana sifat hakiki kebudayaan universal mesti berwujud tiga domain (Koentjaraningrat, 2004: 5-7), yakni (1) cultural value system (sistem nilai budaya), adalah wujud ideal kebudayaan yang berupa kompleks ide gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud itu tegasnya disebut adat (jamaknya: adat istiadat), (2) social system (sistem sosial) atau wujud kepranataan, merupakan tindak-tanduk berpola dalam berbagai bidang kebudayaan suku bangsa Tolaki, dan (3) cultural artifact (artefak budaya), adalah hasil seluruh karya dan aktivitas budaya masyarakat Tolaki. Ketiga ranah wujud budaya *kalo* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) budaya *kalo* sebagai cultural value system adalah wujud *kalo* pada tataran ideal atau adat-istiadat yang berupa sistem nilai dan norma, baik dalam entitas adat kebiasaan semata (*folkways*) maupun *mores* suku bangsa Tolaki. Wujud budaya *kalo* pada tataran itu bernama *kalosara* dan menjadi *sara owoseno/sara mbu'uno* (adat pokok/utama) yang mengatur dua bidang kehidupan fundamental masyarakat Tolaki, yakni "tata krama atau etiket" dan "tata susila atau moral" Nilai-nilai

dan norma-norma budaya *kalosara* dengan demikian menjadi pedoman masyarakat Tolaki tentang bagaimana seharusnya hidup dan bertingkah laku secara sopan dan manusiawi (Tarimana, 1985: 4-5).

- 2) budaya *kalo* selaku social system adalah *kalosara* sebagai bentuk sistem kepranataan masyarakat Tolaki di mana nilai-nilai dan norma-normanya terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Tindak-tanduk pada bidang-bidang itu karenanya bersifat unik menampakkan pola-pola tertentu (Tarimana, 1985: 5-6).
- 3) budaya *kalo* merupakan cultural artifact segala benda dan aktivitas kultural yang menjadi karya manusia Tolaki. Budaya *kalo* dalam hal ini adalah seluruh benda atau barang yang berwujud lingkaran, ikatan lingkaran, pertemuan atau kegiatan sosial yang para pesertanya membentuk lingkaran. Hal itu sesuai dengan arti harfiah *kalo* yaitu lingkaran, atau ikatan. Pada awalnya, budaya artefak Kalo terbuat dari batang *oue* (rotan). Seiring dengan perkembangan zaman, artefak *kalo* terbuat pula dari berbagai materi lain, seperti emas, perak, benang, kain (putih), akar, dan kulit kayu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sungguh demikian, karakteristik budaya *kalo* sebagai sesuatu yang pola bundar atau lingkaran tidak pernah beralih sama sekali. (P3KD Prop. Sultra, 1977: 131; Tarimana, 1993: 20).

Secarahistoris jelas bahwa pembawa budaya *kalo* pertama kali di alam Konawe adalah aditokoh Wekoila. Menurut Basrin Melamba (2013: 104)

Wekoila adalah seorang Bugis yang berasal dari Luwu Sulawesi Selatan dan datang di alam Konawe pada sekitar pertengahan abad ke-12. Budaya *kalo* nama pangkalnya *peowai* (petunjuk atas keutamaan) yang berisi nilai-nilai dan norma-norma budaya perihal bagaimana masyarakat Tolaki menjalani hidup dan interaksi sosialnya secara baik, sopan dan etis.

Budaya *kalo* memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Tolaki Christiaan G.F. de Jong dalam bukunya: *Nieuwe Meesters, Nieuwe Goden: Geschiedenis van de Tolaki en Tomoronene, Twee Volkeren in Zuidoost-Celebes (Indonesia), van Prehistorische Tijden Tot Ca. 1950* (2010: 51) mendeskripsikan fungsi budaya *kalo* seperti berikut.

Kalo digunakan oleh masyarakat Tolaki sebagai alat utama penyampaian pesan dan ritus tertentu, perlindungan bayi dari ancaman roh-roh jahat, rekonsiliasi bagi kasus perzinahan dan kawin lari. *Kalo* selaku simbol persatuan kian, digunakan dalam musyawarah, penobatan raja dan pemimpin/sesepuh, penyelesaian problem serta pembahasan hal-hal penting lainnya. *Kalo* selanjutnya digunakan pula dalam ritual pada pelbagai tahapan siklus pertanian dan pembukaan tanah ladang dan sawah baru. Demikian pula *kalo* digunakan selaku alat utama dalam prosesi upacara pesta panen *kalo* dari bahan emas (dengan tambahan hewan kerbau, seperangkat gamelan seperti gong, dan lain-lain) menjadi alat penebusan bagi beberapa budak belian. *Kalo* dari bahan helai bambu tipis

dan halus difungsikan sebagai alat perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit.

De Jong lebih lanjut menerangkan bahwa artefak budaya *kalo* dengan ukuran besar digunakan untuk keperluan ritual kepada sangia, Allah atau Tuhan. *Kalo* dengan ukuran yang lebih kecil diperuntukkan bagi *mokole*, *anakia*, *putobu* dan lain-lain. *Kalo* seukuran bahu orang dewasa melambangkan jabatan raja yang berfungsi sebagai alat penyelesaian bagi segala urusan kepentingan bangsa. *Kalo* ukuran kepala manusia atau tekukan lutut orang dewasa digunakan untuk penyelesaian masalah penduduk kampung. *Kalo* digunakan pula dalam persiapan pernikahan, ketika seseorang menawarkan seekor kerbau yang belum tertangkap, ritual rekonsiliasi antara budak yang melarikan diri dan tuannya, saat menerima tamu penting, sebagai undangan untuk pertemuan desa dan upacara/pesta tempat tinggal, penawaran permintaan maaf dan penyelesaian perselisihan yang tidak membutuhkan pertemuan musyawarah desa.

Bagi masyarakat Tolaki, *kalo* merupakan suatu pedoman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Tolaki memiliki kemampuan beradaptasi, berinteraksi, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kearifan lokal *kalosara* pada masyarakat Tolaki merupakan eksistensi keberdayaan dalam mendayagunakan potensi yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan terefleksikan dalam wujud perilaku pada berbagai sektor

kehidupan, sehingga menjadikan *kalo* sebagai pedoman dan pengontrol perilaku dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

Tarimana (1993:283) mempertegas bahwa *kalo* memiliki empat fungsi antara lain: (1) *kalo* sebagai ide dalam kebudayaan dan sebagai kenyataan dalam kehidupan etnik Tolaki, (2) *kalo* sebagai fokus dan pengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Tolaki, (3) *kalo* sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan etnik Tolaki, dan (4) *kalo* sebagai pemersatu untuk pertentangan-pertentangan konseptual dan sosial dalam kebudayaan dan kehidupan etnik Tolaki.

a. *Kalo* Sebagai Ide Dalam Kebudayaan dan Sebagai Kenyataan dalam Kehidupan Etnik Tolaki

Sebagaimana yang diungkapkan Koentjaraningrat (1984: 9-13) bahwa wujud ideal dari suatu kebudayaan adalah salah satu dari tiga wujud kebudayaan. Dua wujud lainnya adalah wujud kelakuan dan wujud fisik. Wujud ideal dari suatu kebudayaan adalah adat, atau lebih lengkapnya disebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dibagi dalam empat tingkatan antara lain. tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus. Maka *kalo* dalam tinjauan sebagai adat memiliki empat tingkatan antara lain sebagai berikut.

1) Tingkat Nilai Budaya

Tingkat nilai budaya merupakan sistem nilai budaya yang berfungsi mewujudkan ide-ide dan mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai bagi masyarakat Tolaki dalam hidupnya dikenal dengan sebutan

medulu mepoko'aso (persatuan dan kesatuan), *ate pute penao moroha* (kesucian dan keadilan), dan *morini mbu'mbundi monapa mbu'undawaro* (kemakmuran dan kesejahteraan).

a) Ide *Medulu Mepoko'aso* (persatuan dan kesatuan)

Ide *medulu mepoko'aso* (persatuan dan kesatuan) diwujudkan dalam apa yang disebut *mete'alo-alo* (bantu-membantu) antara keluarga inti atau antara kerabat luas dengan kerabat luas dalam hal mendirikan rumah, sumbangan berupa makanan dan minuman, pada acara-acara, terutama dalam acara perkawinan, dan acara kematian.

b) Ide *Ate Pute Penao Moroha* (Kesucian dan Keadilan)

Ide kesucian diwujudkan dalam rangkaian aktifitas lingkaran hidup seseorang, seperti permandian bayi pertama, pemotongan rambut bayi, penyunatan, pembayatan calon pengantin, mandi masal untuk memasuki bulan puasa, dan permandian mayat. Sedangkan ide keadilan diwujudkan dalam pengambilan keputusan terhadap pembagian warisan kepada anak-anak yang dilakukan orang tua dalam pengambilan keputusan peradilan adat yang dilakukan oleh hakim adat.

c) Ide *Morini Mbu'umbundi Monapa Mbu'undawaro* (Kemakmuran dan Kesejahteraan)

Ide *morini mbu'mbundi* (kemakmuran) diwujudkan dalam usaha mereka untuk merealisasikan dengan apa yang disebut *mondaweako* (jutaan ikat padi), *tepohiu o'epe* (bertebaran bidang

kebun sagu). Sejalan dengan itu, Melamba (2014: 236) menyatakan bahwa tanaman sagu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Tolaki karena pada masa lalu dijadikan sebagai harta warisan (*hapo-hapo/tiari*) dan sebagai simbol bagi kesejahteraan masyarakat Tolaki, *kiniku banggona* (kerbau berombongan), *lua-luano wawo raha* (kebun kelapa yang luas).

d) Ide *Monapa Mbu'undawaro* (Kesejahteraan)

Ide *Monapa Mbu'undawaro* (Kesejahteraan) diwujudkan dengan apa yang disebut *mombekapona-pona'ako* (saling hormat menghormati), *mombekamei-meiri'ako* (saling kasih mengasih), *ndudu karandu* (suasana ketenangan batin yang diliputi dengan alunan bunyi gong yang merdu di tengah malam), dan *tumotapa rarai* (suasana kegembiraan yang diliputi dengan suara hura-hura, tawa dan tepuk tangan yang meriah) (Tarimana, 1993:285).

2) Tingkat Norma-Norma

Pada tingkat norma-norma merupakan nilai-nilai budaya yang berfungsi mengaitkan peranan-peranan tertentu dari orang Tolaki dalam masyarakatnya. *Kalo* berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat Tolaki dalam kehidupannya baik dalam kehidupan keluarga, sosial, politik, dan keagamaan. Pada lingkungan keluarga peranan yang dimaksud ialah peran sebagai ayah, ibu, paman, bibi, mertua, menantu, anak, kemenakan, dan sepupu. Dalam lingkungan sosial, politik, dan pemerintahan seseorang dapat berperan sebagai atasan atau bawahan, serta

dalam kehidupan keagamaan seseorang dapat berperan sebagai dukun atau juru bicara yang memimpin upacara, peserta upacara, imam dan jamaah.

3) Tingkat Sistem Hukum

Pada tingkat sistem hukum merupakan hukum adat orang Tolaki yang berfungsi mengatur bermacam-macam sektor kehidupan orang Tolaki. *Kalo* sebagai hukum adat tampak pada gejala dimana *kalo* berfungsi sebagai alat komunikasi antar keluarga, antar golongan, bahkan sebagai alat yang dipakai dalam penyelenggaraan perkawinan, juga dipakai untuk menyumpa seorang raja, selain itu digunakan dalam upacara tolak bala dan meminta berkah. Penggunaan *kalo* dalam beberapa sektor kehidupan orang Tolaki tersebut merupakan ketentuan-ketentuan hukum adat yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap segala aturan adat akan mendapatkan sanksi baik berupa sanksi batin maupun sanksi fisik (Tarimana, 1993: 287).

4) Tingkat Aturan Khusus

Pada tingkat aturan khusus merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas-aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat Tolaki. *Kalo* sebagai aturan-aturan khusus tertuang dalam apa yang disebut *merou* (aturan khusus dalam berbahasa yang menunjukkan sopan santun), *atora* (aturan khusus dalam komunikasi sosial), *o wua* (aturan khusus dalam bercocok tanam pada umumnya), *o lawi* (aturan khusus dalam bercocok tanam padi khususnya), *o sapa* (aturan

khusus dalam berburu, beternak, dan menangkap ikan), dan *mepori* (aturan khusus dalam membuat dan memakai peralatan).

b. *Kalo* Sebagai Fokus dan Pengintegrasikan Unsur-Unsur Kebudayaan Tolaki

Kalo sebagai fokus dan pengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Tolaki bahwa *kalo* ada hubungannya dengan bahasa sebagai lambang komunikasi, demikian dengan unsur-unsur ekonomi melalui fungsi *kalo* sebagai penjaga tanaman dan pusat ladang padi, dan melalui makna simbolik *kalo* sebagai asas distribusi barang-barang ekonomi. *Kalo* juga ada hubungannya dengan sistem teknologi melalui bentuknya sebagai model dari teknik mengikat dan bentuk alat-peralatan, demikian juga ada hubungannya dengan organisasi sosial melalui makna simboliknya sebagai asas organisasi tradisional, asas organisasi kerajaan, dan sebagai asas politik dan pemerintahan.

Tarimana (2013:291) menguraikan bahwa makna simbolik dari unsur-unsur upacara terintegrasi didalam makna simbolik dari *kalo*. Ide *medulu mepoko'aso* (persatuan dan kesatuan) tercermin di dalam makna simbolik dari lingkaran rotan, demikian juga ide-ide *ate pute penao moroha* (keikhlasan dan kesucian) tercermin didalam makna simbolik dari kain putih, dan ide-ide kemakmuran dan kesejahteraan tercermin didalam makna simbolik dari wadah anyaman dimana lingkaran rotan diletakkan. Dengan peranan *kalo* dalam fungsinya sebagai pengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Tolaki, baik dalam hubungannya dengan beberapa sub unsur dari tiap unsur kebudayaan Tolaki maupun fungsinya sebagai unsur utama dalam upacara, maka *kalo* sangat erat

kaitannya dengan aktifitas orang Tolaki dalam memenuhi dan memuaskan banyak kebutuhan dasar.

Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral, orang Tolaki, menggunakan ajaran-ajaran *kalo* sebagai pedoman hidup, hal tersebut tampak dalam usaha memulihkan suasana kelaparan karena panen tidak jadi, suasana kecelakaan karena bencana alam, suasana kematian yang disebabkan oleh wabah penyakit, suasana penganiayaan karena permusuhan, dan suasana keretakan dan kesalahpahaman baik antar individu, keluarga, maupun antar golongan, sehingga orang Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana tidak baik disebabkan oleh manusia yang telah melanggar adat dan norma-norma agama, sehingga untuk memulihkan suasana tersebut, maka diadakan upacara yang disebut *mosehe wonua* (upacara besar dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat Tolaki). *Kalo* sebagai pemersatu dalam pertentangan konseptual dan sosial kebudayaan Tolaki, tercermin pada peranan *kalo* dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan orang Tolaki antara lain.

(1) *kalosara* digunakan dalam mendamaikan serta mempersatukan antara golongan bagsawan dan golongan budak disebut *kalosara mbutobu*, yakni *kalo* yang digunakan untuk menghadap kepada *putobu* (kepala wilayah) agar kepala wilayah turun tangan dalam memulihkan perselisihan tersebut.

(2) *kalosara* digunakan dalam mendamaikan dan mempersatukan antara golongan pemerintah dan golongan rakyat disebut *sara mokole*, yakni

kalosara yang digunakan untuk menghadap *mokole* (raja) agar raja turun tangan dalam memulihkan perselisihan tersebut.

(3) *kalosara* digunakan untuk mendamaikan atau mempersatukan dua pihak keluarga yang berselisih karena masalah kawin lari disebut *kalosara sokei* yakni *kalo* yang berfungsi untuk membentengi diri dari pihak keluarga yang melarikan gadis dari serangan pihak keluarga yang anak gadisnya dilarikan.

(4) *kalosara* digunakan untuk mendamaikan atau mempersatukan orang dengan seorang yang berselisih disebut *kalosara mekindoroa*, yakni *kalosara* yang berfungsi untuk menyelamatkan hidup seseorang yang berselisih karena keduanya saling mengancam untuk membunuh lawannya.

Agar setiap orang terhindar dari pelanggaran dan menyebabkan kehadiran *kalo*, maka dikembangkanlah kata-kata falsafah yang dapat memberikan sugesti kepada anggota masyarakat pada umumnya dan kehidupan orang Tolaki pada khususnya untuk bertingkah laku dengan baik. keseluruhan aturan *kalo* memiliki nilai filosofi yang dikenal dengan ungkapan *Inae Kona Sara Ie Pinesara, Inae Liasara, Ie Pinekasara*. Falsafah tersebut mengandung arti bahwa barang siapa yang menghormati adat, maka akan diperlakukan secara baik, dan barang siapa yang tidak menghormati adat, maka akan diperlakukan secara kasar (dihukum).

Mazi (2004: 5) menegaskan bahwa ungkapan memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu

diharapkan untuk hidup dan bertingkah laku sesuai dengan norma atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang akan mendapatkan penilaian yang baik apabila sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebaliknya seseorang akan mendapatkan penilaian yang buruk apabila sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Konsep Pembelajaran Sejarah

Pengembangan pendidikan nilai yang terintegrasi dengan pendidikan sejarah tidak terlepas dari humaniora yang memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sejarah harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap. Pendidikan sejarah yang dapat mengembangkan berpikir kritis sehingga menjadikan siswa menjadi manusia cerdas. Hasan (1995: 247) dari subyek penelitian ini akan melahirkan suatu nilai atau tidak bernilai. Nilai sesungguhnya hanya dapat lahir kalau diwujudkan dalam praktik tindakan.

Wiriaatmadja (2002: 402) menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan pengajaran sejarah agar lebih fungsional dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, maka terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

- (1) Materi pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan kecakapan sosial berupa integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta didik sehingga memiliki sikap kebangsaan, kebersamaan dalam

perbedaan, toleransi, empati, dan sikap-sikap positif lain yang berharga baik bagi dirinya, masyarakatnya, maupun bangsanya.

- (2) Untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas dan daya inovatif diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi konsumen IPTEK, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai dari luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan IPTEK. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk belajar dengan daya intelektualnya sendiri, melalui proses rangsangan-rangsangan baik yang berupa pertanyaan-pertanyaan maupun penugasan, sehingga peserta didik dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Peserta didik akan dapat mengembangkan daya kreativitasnya apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif. Oleh karena itu, proses belajar mengajar memberi peluang kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu adanya penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Hal ini akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya diri pada peserta didik. Pada gilirannya, pengalaman ini selanjutnya dapat menjaga proses pembentukan kemandirian.

(4) Dalam proses pengembangan kematangan intelektualnya, peserta didik perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah.

(5) Peserta didik harus diberi internalisasi dan keteladanan, dimana mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi. Dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar serta memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif.

Pembelajaran sejarah dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan untuk mendorong dan merangsang subyek belajar untuk mendapatkan pengetahuan sejarah dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan dan kesejarahan, sehingga membawa perubahan tingkah laku dan menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai dalam ilmu sejarah. Kesadaran adalah suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa untuk memahami keberadaan dirinya sebagai manusia, anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, termasuk sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sardiman, 1994:2).

Dalam berbagai tulisan, Soedjatmoko (1995: 358) mengingatkan betapa pentingnya sebagai bangsa memiliki kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah diartikan sebagai suatu refleksi tentang kompleksitas perubahan-

perubahan yang ditimbulkan oleh interaksi dialektis masyarakat yang ingin melemparkan diri dari gangguan realitas yang ada. Dengan kesadaran sejarah, manusia berusaha menghargai upaya mengungkapkan terhadap kejadian-kejadian yang melingkupinya dan menghargai keunikan masing-masing keadaan.

Kesadaran sejarah juga membantu manusia untuk waspada terhadap pemikiran yang terlalu sederhana, analogi dangkal serta penerimaan pola-pola hukum yang terlalu mudah dalam mengarahkan jalannya sejarah ataupun berada dalam cengkraman determinisme sejarah. Untuk mewujudkan kesadaran sejarah seharusnya sebagai bangsa harus mampu mengambil makna atau pesan moral pada setiap peristiwa, jika tidak maka dalam konteks ini akan mewujudkan bahwa ketidak arifan dalam pemanfaatan kekayaan alam dan budi akal manusia itu pada akhirnya akan menghancurkan eksistensi kemanusiaan dan peradabannya sendiri (Soedjatmoko, 1995: 369).

Pengajaran nilai dalam ilmu sejarah melalui proses pemberian nilai (internalisasi nilai) dengan melalui tahapan yaitu penerimaan nilai, penganggapan atas nilai, penilaian atas nilai, penghargaan atas nilai, pengorganisasian nilai-nilai dan pemeluk nilai (karakteristik nilai). Namun perlu diingat mengajarkan nilai hanya akan berhasil jika di pihak peserta didik ada disposisi batin yang benar, antara lain adalah sikap terbuka dan percaya, jujur, rendah hati, bertanggungjawab, berniat baik, setia, dan taat melaksanakan nilai-nilai disertai budi yang ceria. Nilai-nilai itu tidak dapat

dipaksakan dari luar melainkan masuk ke hati kita secara lembut ketika hati secara bebas membuka diri (Atmadi, 2000:38).

Tujuan pembelajaran sejarah adalah untuk mengembangkan siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci bahwa tujuan pembelajaran sejarah adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar.

- (1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
- (2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial sehingga dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah sosial.
- (3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
- (4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.

(5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar *survive* dan kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.

Hasan (2012:3) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa dimasa lampau kepada generasi muda, wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa dan sebagai pendidikan tentang cara berpikir keilmuan siswa sebagai individu dan sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan seseorang yang mempelajari sejarah pada gilirannya akan memiliki wawasan sejarah, sehingga dapat mengkonsepsikan sejarah dan berguna untuk mengantisipasi masa depan termaksud dalam pembangunan bangsa. Kartodirdjo (1992: 206) mengemukakan bahwa tanpa wawasan sejarah dalam pembangunan bangsa akan menyebabkan suatu bangsa seperti orang pikun, karena bangsa yang tidak mengenal sejarah, ibarat orang yang kehilangan memorinya. Oleh karena itu, bangsa yang tidak mengenal sejarah, akan kehilangan kepribadian dan identitasnya.

Pengajaran sejarah nasional Indonesia di Sekolah memiliki kompetensi untuk membimbing peserta didik ke arah kesadaran sejarah, kesadaran kebangsaan, dan pembentukan karakter atau jati diri, apabila di dalam pengajarannya berlangsung pewarisan (*transfer*) yang disambut dengan peralihan nilai-nilai berbangsa, bertanah air, persatuan dan kesatuan, serta integritas dan kepribadian Indonesia (Wiriaatmadja, 2002: 448).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tujuan pendidikan nilai dalam pembelajaran sejarah yaitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa, untuk mempersiapkan siswa untuk hidup dalam lingkungan masyarakat, mengarahkan siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif, memiliki kecakapan sosial serta memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme.

4. Konsep Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013

Kurikulum dalam perspektif yuridis-Formal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 dirancang untuk penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Menurut Mulyasa (2013: 164) bahwa secara konseptual Kurikulum 2013 memiliki tiga keunggulan, yaitu: (1) kurikulum 2013 menggunakan pendekatan bersifat alamiah (kontekstual) karena berfokus dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing, (2) kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan lain, (3) ada bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam

pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama berkaitan dengan keterampilan.

Pembelajaran sejarah menurut Widja (1989: 7) merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan bangsa di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan merupakan sasaran efektif untuk dapat meningkatkan integritas dan kepribadian bangsa melalui proses belajar mengajar.

Dalam kurikulum 2013 pembelajaran sejarah memberikan inovasi baru yaitu terdapat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Tujuan mata pelajaran wajib yaitu memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi dari peserta didik, masyarakat dan bangsa. Sedangkan mata pelajaran peminatan bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu (Fadhillah, 2014: 45). Menurut Zulkarnain (2017: 33) kurikulum sejarah 2013 bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter berdasarkan nilai Pancasila yang secara substansi mencakup: nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, moral dan pembentukan karakter yang berorientasi pada kurikulum 2013.

Berdasarkan permendiknas nomor 59 tahun 2014, mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas pada kurikulum 2013 memiliki posisi yang sangat penting. Pelajaran sejarah Indonesia termasuk dalam mata pelajaran kelompok A yakni pelajaran dalam kategori wajib pada semua jenjang kelas di SMA. Selain itu, mata pelajaran termasuk dalam kelompok C yakni kelompok mata pelajaran peminatan di jurusan IPS. Menurut Zulkarnain (2017: 40) bahwa sebagai mata pelajaran wajib/inti, mata pelajaran sejarah memiliki peranan strategis dalam membentuk warga negara yang baik dengan menekankan pada karakter keindonesiaan, semangat kebangsaan, nasionalisme, kesadaran sejarah, dan kesadaran bernegara. Disamping itu, mata pelajaran sejarah juga merupakan mata pelajaran kelompok C atau peminatan yang secara substantif bertujuan sebagai pengembang pengetahuan sejarah sebagai disiplin ilmu.

Kurikulum 2013 selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata pelajaran wajib dan peminatan, bila dilihat dari porsi dan jam pelajaran, pelajaran sejarah memiliki porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004. Jika sebelumnya guru sejarah mengeluhkan kurangnya jam pelajaran sejarah yang menjadikan guru kurang maksimal dalam menyampaikan materi pelajaran, maka dalam kurikulum sejarah Indonesia 2013 jam pelajaran sejarah menjadi bertambah, sehingga guru sejarah diuntut harus memiliki keterampilan mengembangkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran agar peserta didik dapat membentuk kompetensi dalam dirinya.

5. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter terdiri dari dua kata yakni, pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan proses menumbuhkan, mendewasakan dan menjadikan manusia secara utuh, agar dapat mengembangkan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia (Harsono, 2011: 162). Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Gaffar (2011: 5) mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses transformasi nilai kehidupan yang di tumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi satu perilaku manusia.

Secara umum karakter merupakan nilai perilaku manusia universal yang meliputi seluruh aktifitas manusia, baik hubungan dengan tuhan, dirinya, sesama manusia, maupun lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Samsuri, 2011: 95). Karakter dapat dilihat dari dua hal, pertama sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, tanpa dipaksakan dalam diri manusia, kedua karakter dapat dipahami sebagai tingkat kekuatan dan mampu menguasai keadaan yang dikehendaki (Koesoema, 2007: 91).

Pendidikan karakter dimaknai sebagai keseluruhan dinamika rasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga dapat menghayati kebebasan, serta bertanggung jawab dalam setiap perilakunya (Kurniawan, 2018: 48). Menurut Pearson (2000: 244), dalam Kumalasari (2016: 49) mendefinisikan bahwa pendidikan karakter merupakan pembelajaran strategis yang mengembangkan tanggungjawab sosial, pribadi, dan diwujudkan dengan pengembangan karakter dan kebajikan moral. Pendidikan karakter secara luas meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku karakter yang baik. Lickona (2012: 87) menyatakan bahwa karakter yang baik memiliki tiga komponen yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral.

Pendidikan karakter di sekolah dapat dimaknai sebagai keseluruhan komponen (*stakeholders*) yang dilibatkan, termasuk komponen pendidikan itu sendiri antara lain: isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktifitas kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah (Mastuhu, 2003: 136). Untuk memaksimalkan pendidikan karakter di sekolah, semua komponen wajib berperan aktif sesuai dengan fungsinya (Abubakar, 2013: 290).

Menurut Komara (2018: 7) mengemukakan bahwa secara garis besar, fungsi pendidikan karakter bangsa adalah sebagai berikut.

- (1) *Development*, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik yang mencerminkan budaya, dan karakter bangsa.
- (2) *Recovery*, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat.
- (3) *Clarification*, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain, yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan karakter bangsa.

Pendidikan karakter dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut.

- (1) Menguatkan serta mengembangkan nilai kehidupan yang dianggap penting penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik, sebagaimana nilai yang dikembangkan. Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam seting sekolah bukanlah sekedar dogmatisasi nilai kepada peserta didik, melainkan sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami, dan merefleksi, suatu nilai, sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
- (2) Mengoreksi perilaku peserta didik, yang tidak bersesuaian dengan nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku peserta didik yang dianggap tidak sesuai, sehingga proses

pengkoreksian terhadap perilaku, dapat dipahami sebagai proses pedagogik.

- (3) Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga, dan masyarakat, dalam memerankan tanggungjawab pendidikan karakter, secara bersama-sama. Tujuan ini memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter di sekolah, harus dihubungkan dengan proses pendidikan keluarga, sehingga pendidikan karakter tidak hanya bertumpuh pada interaksi antara peserta didik dengan guru di sekolah (Mislia, 2016: 130).

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter bangsa yang disusun oleh Balitbang, Kemdiknas (2011: 7) bahwa tujuan pendidikan karakter bangsa sebagai berikut.

- (1) Mengembangkan potensi afektif peserta didik, sebagai manusia, dan warga negara yang memiliki nilai budaya karakter bangsa.
- (2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal tradisi budaya bangsa yang religius.
- (3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
- (4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
- (5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas, dan persahabatan dengan rasa kebangsaan dengan penuh kekuatan (*dignity*).

Menurut Sudarmiani (2013: 32) mengemukakan bahwa nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari berbagai sumber, sehingga diperlukan kearifan berpikir, dan bertindak bagi kalangan pendidikan, dalam pengimplementasian nilai pada proses pembelajaran di kelas. Secara umum sumber nilai dari pendidikan karakter bangsa bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan karakter bangsa, terdapat 18 nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa antara lain:

- (1) Religius
- (2) Jujur
- (3) Toleransi
- (4) Disiplin
- (5) Kerja keras
- (6) Kreatif
- (7) Mandiri
- (8) Demokrasi
- (9) Rasa ingin tahu
- (10) Semangat kebangsaan
- (11) Cinta tanah air
- (12) Menghargai prestasi
- (13) Bersahabat
- (14) Cinta damai

- (15) Gemar membaca
- (16) Peduli lingkungan
- (17) Peduli sosial
- (18) Tanggung jawab

6. Konsep Pengintegrasian Nilai Dalam Pembelajaran Sejarah

Secara harfiah integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integrate*" yang berarti perpaduan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2011: 541) integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Perpaduan yang dimaksud ialah perpaduan nilai budaya dalam materi pelajaran yang terhimpun menjadi satu kesatuan. Menurut Winarno (2013: 23) integrasi memiliki dua definisi yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu.

Poerwardarminta dalam (Trianto 2010: 35) menyatakan bahwa integrasi merupakan penyatuan suatu unsur dengan unsur lain, sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan Muftic (2009: 36) dalam Fajarini (2014: 5) mengartikan integrasi sebagai menyatukan dua tindakan kepada tindakan lainnya yang secara logika berhubungan dengan pernyataan dalam sebuah kelompok dengan maksud untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap fenomena tertentu. Di sisi lain, Agung (2011: 25) mendefinisikan integrasi sebagai bentuk kreasi dan pemeliharaan pola intens dan di verifikasi interaksi antar unit otonom. Sementara itu, Sjarkawi (2011: 4) menyatakan bahwa integrasi merupakan

suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah, dan bercerai berai. Integrasi dapat berupa integrasi politik, integrasi nasional, integrasi budaya.

Fokus integrasi yang dimaksud ialah integrasi nilai budaya, menurut Hasan (2010: 2) mengemukakan bahwa budaya dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat melalui interaksi antar sesama, dan lingkungan alam, sehingga menghasilkan sistem sosial, ekonomi, kepercayaan, pengetahuan, teknologi, dan seni. Budaya mengandung nilai yang melekat pada masyarakat dalam mengatur keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan dijadikan sebagai orientasi dalam kehidupan. Nilai menurut Kartawisastra (1980: 1) merupakan standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. integrasi budaya merupakan hasil dari integrasi institusi, tradisi, dan difusi (Agung, 2011: 8).

Pengintegrasian nilai budaya merupakan suatu proses penyatuan nilai budaya ke dalam mata pelajaran sehingga menjadi bagian dari kompetensi dasar yang utuh dan sistematis. Mulyana (2004: 11) menyatakan bahwa pengintegrasian nilai budaya dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai bagian dari pendidikan nilai yang didasarkan pada rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan, sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang.

Pendidikan nilai menurut Mulyana (2004: 119) adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan

bertindak yang konsisten. Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Secara khusus menurut APEID (*Asia and the Pasific Programme of Educational Innovation for Develompement*) bahwa pendidikan nilai ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai yang diinginkan, membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai tersebut.

Landasan pengintegrasian nilai budaya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 bahwa Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tidak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya.

Pengintegrasian nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah merupakan salah satu alternatif untuk melestarikan budaya lokal, sekaligus penanaman nilai budaya terhadap siswa. Wuryandani (2016: 7) mengemukakan bahwa untuk melancarkan proses pengintegrasian nilai kearifan lokal dalam

pembelajaran di sekolah, seorang guru harus memperhatikan beberapa komponen antara lain:

- (1) Visi, misi, dan tujuan pendidikan
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan
- (3) Kurikulum/materi pendidikan
- (4) Proses belajar mengajar
- (5) Sarana dan prasarana pendidikan
- (6) Manajemen pendidikan di sekolah
- (7) Lingkungan eksternal pendidikan

Menurut Winarno (2013: 23), pengintegrasian nilai kearifan lokal terhadap mata pelajaran harus dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu, sehingga terhimpun dalam satu kesatuan. Pengintegrasian nilai budaya bertujuan untuk tercapainya keterampilan belajar pada materi pelajaran (*content*). Keterampilan belajar meliputi keterampilan berpikir (*thinking skill*), keterampilan sosial (*social skill*), dan keterampilan mengorganisir (*organizing skill*).

Pengintegrasian nilai kearifan lokal *kalosara* dalam pembelajaran sejarah, dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: pengembangan materi pembelajaran, pengembangan soal, bahan ajar, dan model pembelajaran. Widiyatmoko (2015: 46) menyatakan bahwa kreatifitas guru dalam mendesain pembelajaran, diharuskan mampu memetakan materi pelajaran yang dapat disisipi kearifan lokal, sehingga terintegrasi secara harmonis dan tidak tumpang tindih dengan materi yang diajarkan.

Sutarno (2008: 7) mengemukakan bahwa ada empat macam pembelajaran berbasis budaya antara lain:

- (1) Pembelajaran berbasis budaya dilakukan dengan menempatkan budaya sebagai bidang ilmu yang dipelajari secara khusus, tanpa terintegrasi dengan bidang ilmu lain.
- (2) Pembelajaran berbasis budaya dilakukan dengan memperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu.
- (3) Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya.
- (4) Pembelajaran berbasis budaya merupakan bentuk perilaku nyata sehari-hari siswa.

Pelaksanaan pengintegrasian nilai kearifan lokal *kalosara*, seorang guru dapat melakukan analisis pemetaan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) dengan memperhatikan standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL), dan di wujudkan dalam pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sesuai dengan tahapan pembelajaran terpadu, menurut Trianto (2010: 64-67) tahapan pembelajaran terdiri dari 3 bagian antara lain:

1. Tahap Perencanaan

- a. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan
- b. Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator
- c. Menentukan sub keterampilan yang dipadukan
- d. Merumuskan indikator hasil belajar
- e. Menentukan langkah-langkah pembelajaran

2. Tahap Pelaksanaan

Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pembelajar mandiri, tanggungjawab individu dan kelompok, sehingga menuntut adanya kerjasama kelompok dan guru perlu memberikan akomodatif terhadap ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan.

3. Tahap Evaluasi

- a. Memberi kesempatan siswa untuk melaksanakan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya.
- b. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Sementara itu, menurut Saragi (2017: 114-112) langkah-langkah pembelajaran terpadu secara khusus dapat dibuat tersendiri berupa langkah-langkah baru dengan ada sedikit perbedaan yakni sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

- a. Menentukan kompetensi dasar
 - b. Menentukan indikator dan hasil belajar
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengelolaan kelas
 - b. Kegiatan proses
 - c. Kegiatan pencatatan data
 - d. Diskusi
 3. Tahap Evaluasi
 - a. Evaluasi proses
 - b. Evaluasi hasil
 - c. Evaluasi psikomotorik

Berdasarkan keterangan di atas, menggambarkan bahwa pengintegrasian nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah menjadi sangat penting guna membangun kesadaran, pemahaman, dan kepedulian kepada siswa, terhadap nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat, sehingga dapat menciptakan generasi yang terdidik dan berbudaya.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Beberapa kajian penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rauf Tarimana (1993) dengan judul “*Kebudayaan Tolaki*” yang menyimpulkan bahwa *kalo* adalah fokus kebudayaan Tolaki yang berfungsi sebagai lambang pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan Tolaki. Namun dalam penelitian ini tidak menggambarkan tentang bagaimana konsep tersebut di integrasikan kedalam

pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengambil nilai-nilai dalam kebudayaan tersebut sehingga dapat menciptakan generasi yang peduli akan budayanya.

Selain itu, penelitian lain yang menyinggung mengenai kearifan lokal *kalosara* adalah penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hafid (2013) tentang “*Kalosara Sebagai Instrumen Utama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara*” yang menyimpulkan bahwa *Kalosara* sebagai instrumen utama tata kehidupan masyarakat sampai di era sekarang ini masih eksis dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama dalam kehidupan sosial budaya.

Dengan demikian seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan melahirkan berbagai permasalahan termasuk dalam tataran politik dan ekonomi, maka kehadiran *kalosara* sebagai instrumen solusi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai eksistensi *kalosara* dalam kehidupan masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara tanpa menguraikan tentang bagaimana nilai *kalosara* tersebut dapat diintegrasikan kedalam pembelajaran sejarah sehingga peserta didik memiliki karakter yang dihasilkan dari penanaman nilai-nilai budaya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal *kalosara* masih sangat perlu untuk diteliti dan dikaji. Dengan demikian, peneliti mengambil judul “Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Kalosara* Dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 4 Konawe Selatan”.

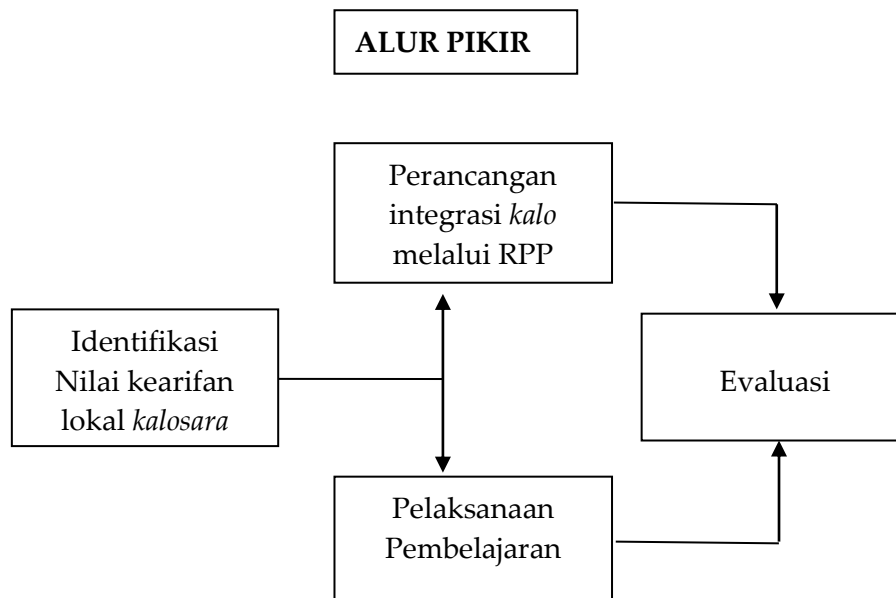
Penelitian ini berusaha mengkaji nilai yang terdapat dalam kearifan lokal *kalosara* yang selanjutnya diintegrasikan dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menjaga sekaligus melestarikan kearifan lokal dengan mengintegrasikan nilai budaya tersebut ke dalam pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan agar peserta didik dapat memahami serta menyadari pentingnya menjaga nilai kearifan lokal yang menjadi warisan leluhurnya, sehingga dapat diterapkan dalam bentuk perilaku kesehariannya.

C. Alur Pikir

pengintegrasian nilai kearifan lokal kepada peserta didik merupakan sesuatu yang penting dilakukan agar mereka mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kebudayaannya. Analisis terhadap dimensi budaya dan pendidikan, memandang etnopedagogi sebagai praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah serta menekankan pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat dimana kearifan lokal tersebut terkait dengan bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Proses ini diperlukan agar peserta didik dapat lebih memahami kondisi lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan akan pentingnya pendidikan yang mengangkat nilai kearifan lokal dalam proses

pembelajarannya, karena melalui upaya ini diharapkan peserta didik mengenal keluhuran nilai budaya masyarakatnya sehingga pada diri mereka dapat tumbuh kebanggaan atas budayanya dan upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pengajaran Pendidikan Sejarah pada semua jenjang pendidikan. Pentingnya pengintegrasian nilai-nilai kearifan *kalosara* pada peserta didik antara lain bertujuan agar peserta didik dapat mengenal dan memahami budaya yang ada disekitarnya sehingga mereka tidak mudah menerima secara mentah-mentah pengaruh budaya lain atau dikenal dengan sebutan *westernisasi*. Adapun alur pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Pengintegrasian nilai kearifan lokal *kalosara* dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai *kalo* yang dapat di integrasikan dalam proses pembelajaran sejarah di SMA. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka guru sejarah terlebih dahulu merancang kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai dalam bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan memasukan atau memadukan nilai kearifan lokal *kalosara* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada proses pelaksanaan pembelajaran sejarah berlangsung guru diharapkan dapat memberikan materi pengayaan berupa nasehat atau motivasi terhadap peserta didik, sehingga dapat memahami budayanya.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi kearifan lokal *kalosara* pada masyarakat Tolaki?
2. Nilai-nilai apakah yang terkandung dalam kearifan lokal *kalosara*?
3. Apakah nilai-nilai kearifan *kalosara* dapat diintegrasikan atau diinternalisasikan dalam proses pembelajaran saat ini?
4. Bagaimana upaya dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal *kalosara*?
5. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan guru dalam membelajarkan nilai-nilai kearifan lokal *kalosara*?
6. Bagaimana respon siswa dalam membelajarkan nilai-nilai kearifan lokal *kalosara*?
7. Bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran sejarah dengan mengintegrasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal *kalosara*?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal *kalosara* dalam pembelajaran sejarah?